

MAKNA PENTING TOL LAUT BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JK

Hendra Maujana Saragih¹

Abstract

The toll of the sea is a Jokowi-JK strategy to revive Indonesia as the era of the ancient empires in the days before Indonesia's independence. Jokowi-JK carrying the idea because 2/3 of Indonesian territory is sea. Indonesia is an archipelagic state where the distance between one island with the other is far a part. So that the price difference between the Java and the eastern part of Indonesia will be much different, especially in papua. This is due to the high transportation costs. Therefore, with the existence of the sea toll, the human resources will be awakened because goods will be well cycled also Will be a lot of business opportunities which will be opened later. The research method used is descriptive analysis case study approach is to look at the phenomenon of existing problems in the field with respect to issues that are examined. The data obtained during the research will processed, analyzed and further processed on the basis of theoretical theory that has been studied. The conclusion that the sea toll that Jokowi-JK must be implemented soon

Keyword: *Strategy, toll of sea, National Development*

Pendahuluan

Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70% wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang

¹ Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Email: hendramaujana@gmail.com

mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Dalam mengembalikan kejayaan nusantara, Jokowi – JK mengusulkan pembangunan tol laut. Tol laut ini bukan jalan tol di laut. Tol laut adalah koneksitas laut dengan kapal-kapal besar dari Barat ke Timur, semua menghubungkan Indonesia secara cepat. Permasalahan bangsa selama ini yang sering sekali diangkat isunya adalah Pembangunan di Negeri ini yang tidak merata. Ada wilayah yang begitu tinggi tingkat kemajuan perekonomiannya dan ada daerah-daerah yang sangat tertinggal. Bahkan dalam dua Pemerintahan terakhir sudah dibentuk Kementerian yang khusus untuk menangani masalah ini meskipun hasilnya ternyata kurang maksimal. Penyebab terjadinya Tidak Meratanya Pembangunan adalah karena Negara ini merupakan Negara kepulauan dimana jarak antara satu pulau ke pulaunya sangat jauh. Biaya transportasi sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan harga-harga barang atau harga-harga komoditi antara satu pulau dan pulau lainnya menjadi berbeda jauh.

Seperti semen di Jawa Rp. 60.000-Rp70.000 per sak di pedalaman Papua bisa Rp1 juta-Rp1,5 juta per sak. Kondisi tersebut dinilai sebagai praktik ketidakadilan akibat sistem logistik yang perlu perbaikan. Beliau juga menilai bila kapal yang melintas di jalur utama sebagaimana Rute kapal dalam konsep tol laut tersebut meliputi Aceh, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua tersebut rutin berlayar maka harga kebutuhan di Papua tidak akan selisih banyak dibanding di Jawa. Paling mahal selisih harga separuhnya, itupun bila sudah di pedalaman. Namun, tanpa jalur distribusi yang baik harga pun berlipat-lipat.

Pembahasan

Strategi Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan pabrik, gedung, perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sementara itu, contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus memahami manajemen nasional yang terangkai dalam sistem.

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional, ditempuh dua strategi pokok pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi penataan kembali Indonesia, yang diarahkan kepada sistem ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip bhineka Tunggal Ika. Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan dalam menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Strategi ini bermaksud untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab di samping hak.
2. Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk pembangunan Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Strategi pembangunan kedua diarahkan kepada dua sarana pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Konsep Nawa Cita

Konsep Nawacita itu terdiri dari sembilan agenda prioritas itu meliputi:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas Sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan Kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Tol Laut

Bagi Jokowi, “tol laut” adalah solusi dari masalah kesenjangan ekonomi di bagian barat dan timur Indonesia. Ide “tol laut” bukan kali pertama dinyatakan Jokowi. Sekalipun sudah beberapa kali diungkap oleh Jokowi, orang masih sering salah-arti dengan maksud “tol laut” itu. Banyak orang mengira bahwa membangun “tol laut” adalah jalan tol di atas laut. Ternyata bukan itu.

Lantas apa maksud “tol laut” ala Jokowi itu?

1. “Tol laut” adalah menyiapkan kapal-kapal besar sebagai alat distribusi barang, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua.
2. “Tol laut” berarti juga menyediakan pelabuhan-pelabuhan dalam sebagai tempat kapal-kapal besar itu. Berarti, ide membuat “tol laut” turut mengupayakan revitalisasi pelabuhan di Indonesia. Dengan cara itu, “tol laut” ala Jokowi jadi terobosan untuk masalah perbedaan harga barang satu wilayah dengan wilayah lain. Selama ini, perbedaan harga barang jadi penyebab pembangunan tidak merata.

Tentu saja, selain bertujuan untuk distribusi barang, “tol laut” itu menjadi sarana pendorong konektivitas (hubungan) antar pulau di Indonesia. Ini satu isu penting lainnya, dalam membaca wilayah Indonesia sebagai kesatuan antar pulau, sekaligus dorong dampak rente ekonominya. Hubungan antar pulau yang lancar juga akan dorong orang saling berkunjung untuk berwisata. Atas ide itu, Sekretaris Jenderal Indonesian National Shipowners Association (INSA), Paulis A. Djohan pun memberikan dukungan. Baginya, “Program tersebut untuk memberdayakan pengusaha daerah dan peningkatan kapasitas pengangkutan. Dengan begitu beban distribusi ke daerah lebih ringan sedangkan untuk logistic lebih merata”.

Posisi Strategis Indonesia

Menyandang status sebagai negara yang geostrategis, dengan menjadi persilangan antara satu benua dan benua lainnya, Indonesia memiliki kekayaan maritim yang sangat eksotik. Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kemudian Benua Asia dan Australia, merupakan titik-titik penting yang membungkus letak geografis Indonesia, sampai-sampai negara-negara asing dibuat tak tahan untuk mengeksplorasi keindahan Nusantara. Untuk itu tidak salah jika presiden Jokowi dalam mimpinya, hendak mewujudkan apa yang dikenal sebagai tol laut yang akan menghubungkan Sabang sampai Merauke. Sebagai negara maritim (International Maritime organization) , sudah selayaknya Indonesia memang berjaya di lautan.

Merancang dengan serius konsep tol laut dari Jokowi menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Deddy Priatna, telah dilakukan beberapa langkah untuk segera merealisasi proyek yang dianggarkan menelan biaya sebesar 700 triliun, akan dibangun 24 pelabuhan strategis, short sea shipping (Marry R. Brooks, 2009), fasilitas kargo, serta pengembangan pelabuhan komersil sebanyak 1.481 buah. Pembangunan transportasi multi moda dan infrastruktur penunjang lainnya juga akan dibangun. Menurut perhitungan Bappenas, diperlukan setidaknya Rp 39,5 triliun untuk 24 pelabuhan yang akan tersebar di Banda Aceh dengan anggaran Rp 1 triliun, Kuala Tanjung Rp 3 triliun, Belawan Medan Rp 3 triliun, Dumai Rp 1,5 triliun, Batam Rp 3 triliun, Padang Rp 1,5 triliun, Pangkal Pinang Rp 1,5 triliun dan Pelabuhan Panjang yang menelan anggaran Rp 1,5 triliun. Sementara itu di Pulau Jawa, pelabuhan-pelabuhan yang akan dibangun atau dikembangkan adalah Tanjung Priuk, Cilacap, serta Tanjung Perak dimana setiap pelabuhan kebagian anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.

Untuk wilayah Kalimantan, tol laut akan merambah Pontianak Rp 1,5 triliun, Palangkaraya Rp 1 triliun, Banjarmasin Rp 1,5 triliun dan Maloy Rp 1 triliun. Daerah lain yang mendapat alokasi dana tol laut adalah Lombok, Makasar, Kupang masing-masing Rp 1,5 triliun, serta Bitung Minahasa Utara Rp 3 triliun, Halmahera, Merauke Sorong masing-masing Rp 1,5 triliun, serta Ambon dan Jayapura masing-masing sebesar Rp 1 triliun. Terkait dengan besaran dana yang akan dipakai, Denny menegaskan bahwa pemerintah akan memakai dana APBN, BUMN, serta pihak swasta. Sebagai pelengkap, akan dibangun pula infrastruktur (Sullivan, Arthur, Steven M.Sheffrin, 2003) penunjang dari tol laut seperti penyeberangan-penyeberangan.

Gambar 1. Program Tol Laut



Sumber: (Bappenas/infografis, Andhika Akbaryansyah/detik.com)

Makna Tol Laut

Ide Pak Jokowi sebenarnya sederhana yaitu pembangunan Tol Laut untuk menjembatani kesenjangan pembangunan (Alisyahbana A, Abdullah.P, 2003) dan infrastruktur antara daerah Timur dan Barat Indonesia yang memiliki perbedaan harga antara satu daerah

dengan daerah lain yang mencolok bisa di tekan sehingga sama rata atau setidaknya perbedaannya tidak terlalu jauh, dan tol laut ini dapat di kelilingi dengan memanfaatkan kapal besar sebagai alat transportasi utama dari Sumatera ke Papua, dengan begini manajemen logistik dapat di perbaiki. Hal ini dapat memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentu saja hal ini larinya ke ekonomi, inflasi dan ekonomi makro, dalam mengembangkan konsep tol laut, peranan kapal besar sangat penting karena kapal-kapal tersebut yang setiap hari berkeliling ke pelabuhan-pelabuhan laut dalam atau *deep sea port* (Jeroen Touwen, 2003). Tol laut ini bukan jalan, akan tetapi adanya pelabuhan dalam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang membuat lalu lintas pasokan barang lebih lancar dan harga-harga pun lebih stabil.

Tol laut rasanya kurang tepat, apalagi dikaitkan dengan jalan Tol yang mendapat citra kurang baik di mata masyarakat, yang di maksud oleh Presiden Jokowi adalah suatu jalan atau koridor laut yang bebas hambatan yang bisa memuat angkutan antar pulau menjadi jauh lebih murah dan bisa di akses lebih mudah, jembatan laut bebas hambatan mungkin lebih cocok di gunakan di dibandingkan dengan istilah tol laut yang sudah terlanjur memasyarakat. Apabila di asosiasikan dengan infrastruktur jalan darat akan ada perbedaan mendasar yang membuat infrastruktur angkutan laut menjadi lebih sulit dan komplek untuk di kerjakan. Transportasi laut dengan dua infrastruktur dasar yaitu pelabuhan (Suyono, 2003) dan kapal tidak bisa di sederhanakan sebagaimana moda transportasi darat, membangun pelabuhan ,terutama pelabuhan modern dengan segala fasilitas pendukungnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan penggunaan pelabuhan tersebut, pelabuhan untuk mengangkut manusia jelas berbeda dengan pelabuhan batubara,hal ini dikarenakan pelabuhan batu bara memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dengan pelabuhan yang mengangkut kontainer, fasilitas pendukung untuk pelabuhan kontainer hampir dipastikan tidak bisa untuk operasional kapal tanker untuk mengangkut barang-barang cair.

Begitu juga dengan kapal batu-bara, bijih besi, nikel, dan sejenisnya harus diangkut dengan kapal curah kering yang tidak mungkin di gunakan untuk bahan bakar minyak . kapal tanker yang dimiliki Pertamina tidak bisa dan tidak boleh di gunakan mengangkut kontainer . kapal penumpang milik Pelnis secara teknis tidak memiliki fasilitas pendukung untuk mengangkut ternak dari Nusa Tenggara ke Jakarta.

Apakah ada kapal dan pelabuhan multiguna yang bisa di gunakan untuk mengangkut semua jenis barang sehingga pembangunan tol laut bisa di gunakan untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara? Jawabannya ada, akan tetapi pelabuhan dan kapal tersebut hanya ada di abad pertengahan seperti yang di gunakan oleh Cristoper

Columbus yang berkeliling dunia bersama Cornelis De Houtman yang mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Di mana pada masa itu manusia dan ternak dan barang diangkut oleh kapal yang sama.

Pemetaan adalah satu-satunya langkah pertama yang harus dilakukan. Pengambilan kebijakan harus mengetahui dengan jelas alur perdagangan (Robin A. Donkin, 2003) atau alur transportasi laut yang pada saat ini terjadi dan apa yang akan diharapkan terjadi pada jangka pendek, menengah dan panjang kedepannya. Peta ini harus memuat data yang lengkap meliputi jenis barang, volume, frekuensi berikut dengan infrastruktur yang selama ini ada baik itu pelabuhan dan kapal yang digunakan.

Dengan peta yang ada mulailah Jokowi-Jk dengan semua tim terkait membuat rencana kerja pengembangan tol laut yang tepat guna, membangun pelabuhan besar akan menjadi investasi boros yang sia-sia apabila jenis dan volume barang yang di muat dan di bongkar di pelabuhan tersebut tidak selesai. Mengoperasikan kapal ultra large carrier yang sangat besar dengan daya angkut 18000 kontainer akan membuat para ahli bisnis bertanya-tanya kemana kapal itu akan di sandarkan dan muatan apa yang tiba-tiba harus di angkut.

Implementasi terbaik dari tol laut adalah membangun pelabuhan yang tepat dan mengoperasikan kapal yang sesuai dengan pola perdagangan yang ada sambil menunggu perbaikan infrastruktur selesai, secara simultan pemerintah harus juga membenahi hal-hal yang menyebabkan tingginya biaya investasi dan biaya operasional dalam bidang angkutan laut.

Sampai saat ini lima pelabuhan sudah selesai di kerjakan dan 24 pelabuhan lagi di targetkan pada 2017. Berdasarkan teori sinoptik bahwa model berfikir sistem perencanaan pembangunan dengan konsep tol laut sehingga objek perencanaan di pandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan yang di sebut visi. Dengan konsep identifikasi masalah, ruang lingkup, klasifikasi dan penyelesaian masalah, dengan selesainya pengerjaan tol laut di beberapa wilayah di Jawa maka berdasarkan teori tersebut jelas sudah hal ini berjalan sesuai dengan keinginan Jokowi-Jk membuat sesuatu hal yang positif dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membantu terciptanya Indonesia sebagai negara maritim, hal ini tentu saja berdampak terhadap kepentingan nasional jika tahun 2017 semua pengerjaan tol tersebut selesai maka pemerataan harga/ekonomi dan kebutuhan akan tersebar sama rata antara daerah Barat dan daerah Timur di Nusantara. Dengan adanya konsep tol laut yang diimpikan oleh Bapak Jokowi di dalam pemerintahannya semestinya ini adalah jawaban dari permasalahan yang dialami oleh negara ini, tetapi sebelum hal ini di wujudkan semestinya pemerintah

mesti membuat perencanaan tepat guna supaya supaya dana yang di keluarkan tidak sia-sia.

Tantangan Tol Laut

Pemerintahan Jokowi-JK mesti melihat hal ini sebagai sebuah tantangan, apalagi lima dari 24 pelabuhan yang dicanangkan di Jawa sudah selesai serta sisanya akan selesai pada tahun 2017 mendatang. Dengan demikian program Presiden Jokowi ini terwujud maka pemerataan ekonomi yang timpang antara barat dan timur dapat di minimalisir.

Bagi Jokowi "Tol Laut" adalah solusi dari masalah kesenjangan ekonomi di bagian barat dan timur Indonesia. Tol laut bukanlah membangun jalan tol di atas laut melainkan menyediakan kapal-kapal besar sebagai alat distribusi barang dan membangun pelabuhan-pelabuhan mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Dengan adanya program tol laut ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, karena dengan adanya program ini, selain untuk mendistribusi barang, program tol laut juga bisa menjadi sarana pendorong konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia.

Program pembangunan tol laut oleh Presiden Jokowi dinilai lebih realistis ketimbang proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang masih jalan di tempat. Jika terealisasi, pengusaha yakin tol laut bisa menekan biaya logistik. Karena tol laut tak perlu membangun jalan seperti JSS. "Dari pada bangun jalan dulu, karena laut kan lebih cepat. Nggak perlu matok-matok nggak boleh jalan atau apa," Presiden Jokowi memperkirakan tol laut mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk menekan inflasi. "Kalau harga (barang) lebih murah bisa menekan inflasi, produktivitas dan efisiensi naik.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, semestinya memiliki transportasi di wilayah kelautan yang memadai. Namun, kenyataannya hingga kini hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Direktur Utama PT Pelni (persero) Wimbo Sulistiyo Hardjito menilai ada harapan hal tersebut akan terwujud. Dalam hal itu Wimbo melihat harapan itu saat Presiden terpilih Jokowi dalam kampanyenya menyatakan akan membangun sebuah transportasi kelautan yang baik disebut sebagai "Tol Laut". Tol laut adalah konsep pelayaran untuk memudahkan pengangkutan. Baik barang maupun orang,"

Tujuan dari tol laut menurut agar tidak adanya ketimpangan harga di berbagai wilayah di Indonesia yang terpisah oleh lautan. Wimbo menambahkan agar kegiatan ekonomi itu seimbang antara Pulau Jawa dan Indonesia Timur maka perlu ada sarana pendistribusian barang sebagai kegiatan ekonomi. Pasalnya biaya barang dan bahan pokok di Jawa selisih jauh dengan di Indonesia Timur. "Oleh sebab itu, konsep Tol Laut

yang akan dibangun oleh pemerintahan Jokowi-JK patut untuk didukung dan segera direalisasikan".

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan pembenahan pada infrastruktur Indonesia, agar konektivitas dapat lebih baik. Jokowi sendiri sudah menyiapkan konsep infrastruktur yang akan lebih memudahkan wilayah satu dengan yang lain terhubung. Melalui konsep tol laut, Jokowi akan membuat wilayah pesisir laut Indonesia tereintegrasi satu sama yang lainnya. Kunci utama pembangunan tol laut ini, adalah pembangunan dan integrasi 24 pelabuhan besar di Indonesia.

Kesimpulan

Pembangunan tol laut ini tentu saja memberikan manfaat pada mereka yang menggunakan jalur darat sebagai nadir bisnis mereka. Salah satunya adalah industri logistik, yang harus berjibaku dengan masalah infrastruktur jalan yang belum memadai. Kedua yang akan menjadi besar adalah Sumatera. Untuk Indonesia Timur sendiri masih belum terlalu maksimal meskipun sudah ada bisnis JNE di sana. Presiden Joko Widodo telah menemukan cara untuk mempercepat realisasi program tol laut. Program ini dianggap harus segera direalisasikan karena sangat strategis dan potensial. Di bawah tampuk kepemimpinannya mengupayakan menggali potensi sumber daya laut. "Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban nasional. Telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya mengembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang Indonesia di masa lalu, bisa kembali membahana. Indonesia hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, martabat dan harga diri. Indonesia mesti menyusun peradaban secara mandiri. Bangsa yang besar serta kreatif ikut memberikan sumbangan nilai keluhuran bagi peradaban global.

Daftar Pustaka

- Alisyahbana A, Abdullah. P. (2002). *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia* Yogyakarta, BPF.
- Donkin, Robin A. (2003). *Between East and West: The Moluccas and the Traffic in Spices up to The Arrival of Europeans*, Britannia, Diane Publishing Company.
- Hadi, Sudharto P, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta
- Jerry H, Bentley, *Seascapes: Maritime, Histories, Littoral Cultures and Transoceanic Exchanges*, University of Hawaii press, Honolulu.
- Marry R, Brooks. (2009). *Liberalization Maritime Transport, International Transport Forum*, Paris, Forum Paper.

Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrin. (2003). *Economics: Principles in Action*. New Jersey. Prentice Hall.

Suyono, RP. (2003). *Pengangkutan Intermodal Ekspor-Import Melalui Laut*, Jakarta, PPM.

Touwen, Jeroen. (2001). *Shipping and Trade in The Java Sea Region: a Collection of Statistics on The Major Java Sea Port*, Leiden. KITLV Press.